

KINERJA PEMERINTAH DESA BESUKI KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK DALAM Mendukung PROGRAM KETAHANAN PANGAN HEWANI BERUPA KAMBING/DOMBA

Rina Dwi Kristantina¹⁾, Suwarno²⁾

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: rinadwi@gmail.com

Submitted: 28-08-2025 | Accepted: 29-08-2025 | Published: 31-08-2025

<p>Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Desa; Program Ketahanan Pangan; Kambing</p>	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja pemerintah Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dalam mendukung program ketahanan pangan hewani kambing/domba serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif dengan teori kinerja organisasi Dwiyanto (2021), penelitian ini berfokus pada produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah desa sangat positif. Produktivitas meningkat berkat pemilihan bibit unggul, partisipasi aktif masyarakat, dan transparansi pengelolaan. Kualitas pelayanan didukung SOP, pelatihan aparatur, dan umpan balik masyarakat, memperkuat akuntabilitas. Responsivitas terlihat dari musyawarah desa, pemetaan potensi, dan survei kebutuhan, memungkinkan program menyesuaikan kebutuhan peternak. Responsibilitas diwujudkan melalui regulasi jelas dan pembagian tugas sesuai keahlian, mengacu pada PMK 146 Tahun 2023. Akuntabilitas terjaga melalui laporan pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat. Faktor pendukung mencakup teknologi pakan, inseminasi buatan, serta pelatihan dan pendampingan ahli. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal, pengetahuan peternak, dan akses pasar masih perlu diatasi demi keberlanjutan program.</p>
<p>Keywords: Village Government Performance; Food Security Programme; Goats</p>	<p>Abstract <i>This study aims to analyze the performance of the Besuki Village government, Munjungan District, Trenggalek Regency, in supporting the livestock food security program for goats/sheep and identifying its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach based on Dwiyanto's (2021) organizational performance theory, the study focuses on productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed interactively. The results show that the village government's performance is highly positive. Productivity has improved through the selection of superior livestock breeds, active community participation, and transparent management.</i></p>

Service quality is supported by Standard Operating Procedures (SOP), training for village officials, and community feedback mechanisms, strengthening accountability. Responsiveness is reflected in village deliberations, potential mapping, and needs surveys, allowing the program to adapt to farmers' needs. Responsibility is demonstrated through clear regulations and task assignments based on expertise, aligned with PMK 146 of 2023. Accountability is maintained through comprehensive accountability reports and community-based supervision. Supporting factors include feed technology, artificial insemination, training, and expert assistance. However, challenges such as limited capital, farmers' knowledge, and market access remain obstacles that must be addressed to ensure the program's sustainability.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia meskipun telah terjadi kemajuan ekonomi. Pada tahun 2024, sekitar 9-10% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor yang memperparah kemiskinan meliputi ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya lapangan kerja yang berkualitas. Dampak pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga mendorong lebih banyak warga ke jurang kemiskinan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai strategi untuk mengatasi kemiskinan, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dirancang untuk mendukung keluarga miskin agar tetap bisa mengakses pendidikan dan kesehatan. Kartu Prakerja juga dihadirkan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pencari kerja agar mereka lebih siap bersaing di pasar kerja (Hidayat & Pambudi, 2018).

Selain itu, pemerintah menjalankan program pengembangan infrastruktur dan layanan dasar seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini bertujuan memastikan masyarakat kurang mampu mendapat akses lebih baik terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. Di sektor ekonomi, pemerintah juga mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani dan nelayan. Salah satu program inovatif yang menonjol adalah Program Ketahanan Pangan Hewani. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan, melalui pengembangan peternakan kambing dan

domba. Peternak mendapat pelatihan teknis, bibit unggul, dan fasilitas pemeliharaan agar produktivitas dan kualitas ternak meningkat. Hasilnya, mereka bisa memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan daging, susu, dan produk olahan lainnya. Program ini juga memiliki dampak sosial yang lebih luas, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program ini membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola sumber daya secara efektif. Selain manfaat ekonomi, program ini juga berkontribusi pada peningkatan asupan gizi keluarga melalui penyediaan protein hewani yang lebih terjangkau (Saihudin, 2019).

Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, program ketahanan pangan hewani menitikberatkan pada penyediaan bibit unggul, pelatihan manajemen peternakan, serta peningkatan kualitas pakan dan kesehatan ternak. Pemerintah juga mendukung pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan akses, pasar ternak, dan fasilitas pengolahan produk ternak. Penerapan teknologi modern, seperti sistem informasi manajemen ternak, juga didorong untuk meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Agar peternak lebih mudah menjangkau pasar, program ini memfasilitasi pembentukan koperasi dan kelompok tani. Kemitraan dengan sektor swasta juga didorong untuk memperkuat rantai pasok dan memastikan peternak mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif. Upaya pengendalian penyakit hewan menjadi prioritas melalui vaksinasi massal dan penyuluhan kesehatan hewan guna menjaga produktivitas ternak. Pemerintah juga memberikan berbagai subsidi, seperti bantuan pakan, vaksin, dan peralatan peternakan, untuk mengurangi beban biaya produksi. Hal ini bertujuan meningkatkan profitabilitas usaha peternak kecil dan mendorong pengembangan usaha pengolahan hasil ternak agar bernilai tambah lebih tinggi.

Di Jawa Timur, program ketahanan pangan hewani menunjukkan hasil positif dengan peningkatan produksi sapi, kambing, dan ayam. Pemerintah daerah mendistribusikan bibit ternak unggul dan memberikan pelatihan teknis kepada peternak. Infrastruktur pendukung seperti kandang modern, fasilitas kesehatan hewan, serta pasar ternak juga dikembangkan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing peternak lokal. Selain penguatan ekonomi lokal, program ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan protein hewani yang lebih stabil. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga penelitian turut mendorong inovasi teknologi peternakan agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan kemiskinan, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci. Dengan kebijakan yang inklusif dan program yang berkelanjutan, setiap lapisan masyarakat diharapkan bisa merasakan manfaatnya. Peningkatan infrastruktur ekonomi, pendidikan, pelatihan, serta akses ke layanan kesehatan dan sosial akan membantu membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan merata. Komitmen bersama dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan program-program ini berjalan efektif dan mencapai dampak jangka panjang. Melalui evaluasi berkelanjutan, program-program tersebut bisa terus disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui strategi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan tekad yang kuat dan kerja sama yang berkesinambungan, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kinerja Pemerintah Desa Besuki, Kabupaten Trenggalek, dalam mendukung program ketahanan pangan hewani berupa kambing/domba. Pendekatan ini bertujuan menggali pemahaman mendalam terkait fenomena sosial yang terjadi di lapangan, dengan menekankan pada proses serta makna subjektif dari para partisipan (Moleong, 2018). Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran kontekstual yang lebih komprehensif, meskipun diakui memiliki kelemahan dalam hal generalisasi dan potensi bias dari peneliti. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dengan pertimbangan bahwa desa ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dan menjadi sasaran program ketahanan hewani. Lokasi ini dianggap representatif untuk memahami bagaimana implementasi program berlangsung, dampaknya terhadap masyarakat, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keberhasilannya. Fokus penelitian diarahkan pada lima indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto (2021), yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima aspek ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan program secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap para informan utama, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, serta masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen pemerintah, arsip desa, serta literatur yang mendukung pemahaman lebih luas mengenai konteks penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi bertujuan mengamati langsung proses distribusi kambing/domba, pelatihan yang diberikan, serta kondisi peternakan di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan perangkat desa dan masyarakat penerima manfaat guna menggali pengalaman, tantangan, serta dampak program terhadap kesejahteraan mereka. Dokumentasi melengkapi hasil observasi dan wawancara dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi terkait kebijakan, laporan proyek, dan data statistik kemiskinan desa. Keabsahan data dijamin melalui metode triangulasi, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan terpercaya. Misalnya, hasil wawancara dari penerima manfaat akan diverifikasi dengan pengamatan langsung dan laporan resmi dari pemerintah desa, sehingga dapat menghindari bias subjektif.

Proses analisis data mengacu pada metode Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana semua informasi dicatat dalam bentuk deskriptif maupun reflektif. Selanjutnya, data dikondensasi dengan merangkum dan memilah informasi penting serta menyaring hal-hal yang kurang relevan. Data yang sudah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau tabel agar lebih mudah dipahami. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna dari data yang terkumpul. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi agar sesuai dengan kenyataan di lapangan dan tidak menyimpang dari data yang ada. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kinerja pemerintah desa dalam mendukung program ketahanan hewani di Desa Besuki. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi acuan untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan Hewani Berupa Kambing/Domba

Pemerintah Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung program ketahanan pangan hewani berbasis pengembangan ternak kambing dan domba. Fokus utama program ini adalah meningkatkan produktivitas ternak serta memastikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam aspek produktivitas, pemerintah desa melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk peternak lokal dan mantri peternakan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemilihan bibit unggul serta pelatihan teknologi pakan dan manajemen kandang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ternak yang dihasilkan. Penyuluhan yang berkelanjutan juga diberikan agar peternak memahami cara pengolahan hasil ternak yang lebih efisien (Sinaga et al., 2020).

Selain meningkatkan keterampilan peternak, pemerintah desa membangun infrastruktur pendukung, seperti kandang komunal dan akses air yang lebih baik. Ini membantu memastikan keberlanjutan usaha peternakan. Tantangan yang muncul, seperti keterbatasan sumber daya dan pengetahuan peternak, diatasi dengan membentuk kelompok ternak. Kelompok ini memfasilitasi kolaborasi antarpeternak serta membuka akses pasar yang lebih luas. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini, didukung oleh pengawasan ketat dari pemerintah desa agar program tetap berjalan sesuai rencana. Pendampingan teknis oleh mantri peternakan juga meningkatkan kepercayaan diri peternak dalam mengelola usaha mereka.

Dari sisi kualitas pelayanan, pemerintah desa berupaya menjaga kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun. SOP ini menjadi panduan dalam menjalankan program agar lebih terarah dan transparan (Mananeke et al., 2019). Sosialisasi dan pelatihan bagi aparat desa memastikan pemahaman yang merata terkait prosedur dan tanggung jawab. Pengawasan rutin juga dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan efektif dan akuntabel. Setiap kendala yang muncul ditindaklanjuti dengan cepat melalui mekanisme umpan balik yang konstruktif. Pengelolaan fasilitas kerja juga menjadi perhatian serius. Tata letak ruang kerja yang optimal, pengarsipan dokumen yang baik, serta lingkungan kerja yang kondusif mendukung kelancaran pelayanan. Selain itu, pemerintah desa mengadakan pelatihan

dan studi banding bagi aparaturnya yang terlibat agar mereka memahami praktik terbaik dari desa lain yang telah berhasil menjalankan program serupa. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparaturnya dalam mendukung program ketahanan pangan hewani. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pemerintah desa secara aktif membuka ruang dialog agar masyarakat bisa memberikan masukan dan menyampaikan kebutuhan mereka. Transparansi dalam pengelolaan program menciptakan kepercayaan dan mendorong keterlibatan masyarakat lebih dalam. Dengan strategi yang matang, pengelolaan yang baik, serta dukungan penuh dari masyarakat, program ketahanan pangan hewani di Desa Besuki berpotensi memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Responsivitas merupakan kunci dalam pelayanan publik, mencerminkan kemampuan pemerintah desa memahami dan merespons kebutuhan masyarakat (Akbar, 2018). Di Desa Besuki, responsivitas terlihat melalui pendekatan partisipatif dalam program ketahanan pangan hewani, khususnya pada peternakan kambing dan domba. Pemerintah desa aktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa, pemetaan potensi, dan survei langsung ke rumah-rumah peternak. Musyawarah desa menjadi forum efektif untuk mendengar aspirasi masyarakat dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi. Pemetaan potensi desa membantu mengidentifikasi jumlah ternak dan infrastruktur pendukung, sementara survei langsung memberikan data akurat terkait kondisi ternak, kebutuhan pakan, dan vaksinasi. Hasil survei menunjukkan adanya perkembangan ternak, namun juga mengungkap kasus kematian hewan yang memerlukan perhatian. Responsivitas pemerintah desa juga tercermin dari sikap proaktif pegawai dalam menghadapi kendala. Mereka cepat tanggap, misalnya dengan menghubungi mantri hewan saat ada masalah kesehatan ternak. Selain itu, pemerintah desa fleksibel dalam menyesuaikan program, seperti berkolaborasi dengan pihak lain saat terjadi kekurangan pakan akibat cuaca ekstrem. Komunikasi terbuka terus dijaga melalui pertemuan rutin dan forum diskusi kelompok peternak, di mana masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan masukan. Partisipasi aktif ini membuat warga merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Responsibilitas dalam program ini memastikan bahwa semua aktivitas dan keputusan dijalankan sesuai prinsip administrasi yang benar dan kebijakan yang berlaku (Kusnendar, 2018). Pemerintah desa mengacu pada regulasi resmi, seperti PMK 146

Tahun 2023, yang mengatur pengalokasian dana desa untuk program ketahanan pangan. Regulasi ini menekankan transparansi dan akuntabilitas, memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemahaman dan penerapan regulasi oleh aparatur desa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan, serta pengalaman. Sosialisasi peraturan dari pemerintah daerah dan pusat, serta dukungan pendampingan teknis, sangat membantu aparatur desa dalam menjalankan program sesuai aturan. Pengalaman mengelola program sebelumnya juga menjadi faktor penting dalam memahami penerapan kebijakan dengan lebih baik. Pemerintah Desa Besuki membagi tugas pokok dan fungsi aparatur sesuai kompetensi masing-masing. Setiap individu memiliki tanggung jawab jelas, seperti melakukan penilaian kebutuhan, memberikan penyuluhan, hingga mengawasi pelaksanaan program. Penugasan spesifik ini didasarkan pada kebutuhan program dan didukung oleh penyuluh teknis agar pelaksanaan lebih efektif. Akuntabilitas juga diterapkan melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala, memastikan setiap langkah program bisa dipertanggungjawabkan (Sedarmayanti et al., 2020). Dengan kombinasi responsivitas dan responsibilitas yang baik, program ketahanan pangan hewani di Desa Besuki berjalan lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warga.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan Hewani Berupa Kambing/Domba

Kinerja Pemerintah Desa Besuki dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Hewani berupa kambing/domba didorong oleh berbagai faktor pendukung yang strategis. Salah satu faktor utama adalah pemanfaatan teknologi pakan dan inseminasi buatan (IB), yang bertujuan meningkatkan kualitas genetik ternak serta mempercepat pengembangbiakan. Pemerintah desa juga melakukan pemantauan berkala untuk mengevaluasi dampak teknologi ini, memastikan hasil positif dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pelatihan bagi peternak menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemampuan mereka mengelola ternak. Pelatihan ini mencakup pemahaman teknologi pakan, manajemen kandang, serta perawatan ternak yang lebih efektif. Tak hanya itu, aparat desa juga dibekali pelatihan agar mampu menerapkan peraturan yang mendukung keberhasilan program. Pendampingan oleh tenaga ahli dan

penyuluh pertanian juga menjadi faktor kunci yang membantu peternak serta pemerintah desa dalam memahami praktik terbaik pengelolaan ternak. Kehadiran ahli ini memperkuat kemampuan teknis peternak dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Mekanisme umpan balik masyarakat yang diwujudkan melalui kotak saran dan musyawarah desa turut berkontribusi dalam memastikan program berjalan sesuai kebutuhan warga. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan pendapat, yang kemudian diakomodasi oleh pemerintah desa untuk perbaikan program. Penggunaan metode pengumpulan data seperti pemetaan potensi, survei langsung, dan musyawarah desa juga memperkuat dasar pengambilan kebijakan. Dengan data yang akurat, pemerintah desa lebih mudah merancang program yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, regulasi PMK 146 Tahun 2023 menjadi pedoman yang memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Aturan ini memberi arahan jelas dalam alokasi anggaran, sehingga program ketahanan pangan hewani dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan program ini juga menghadapi berbagai faktor penghambat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam merawat dan mengelola ternak. Banyak peternak belum memiliki pengalaman atau pelatihan memadai, yang berdampak pada rendahnya produktivitas. Untuk mengatasi ini, pemerintah desa aktif mengadakan penyuluhan dan pelatihan teknis bersama dinas terkait. Keterbatasan akses modal juga menjadi penghalang signifikan. Peternak kerap kesulitan mendapatkan bibit unggul dan peralatan karena minimnya dukungan finansial. Pemerintah desa berupaya memfasilitasi akses ke lembaga keuangan atau koperasi agar peternak bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah, memungkinkan mereka berinvestasi lebih baik dalam meningkatkan kualitas ternak. Selain itu, akses pasar yang terbatas juga menjadi tantangan. Peternak kesulitan menjual hasil ternaknya dengan harga yang layak karena kurangnya jaringan pasar. Pemerintah desa pun berupaya membangun jaringan pasar yang lebih luas agar hasil ternak lebih mudah terserap dan mendatangkan keuntungan bagi peternak. Keterbatasan anggaran menjadi kendala lain yang cukup serius. Dana desa yang terbatas memengaruhi pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, hingga pengadaan fasilitas pendukung. Pemerintah desa berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada dan menyesuaikan program dengan kebutuhan prioritas. Dalam situasi darurat, seperti kekurangan pakan akibat cuaca ekstrem, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten juga

diupayakan sebagai solusi alternatif. Kurangnya pengawasan dan evaluasi secara berkala turut menjadi penghambat keberlanjutan program. Meski ada beberapa keberhasilan dalam pengembangbiakan ternak, beberapa kasus kematian ternak, terutama di Dusun Ponggok, tetap terjadi. Pemerintah desa diharapkan lebih aktif melakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk meminimalisir angka kematian ternak serta memastikan program berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pemerintah Desa Besuki berhasil menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung program ketahanan pangan hewani berbasis pengembangan ternak kambing dan domba. Program ini efektif meningkatkan produktivitas ternak melalui pemilihan bibit unggul, pelatihan manajemen kandang, serta penyuluhan berkelanjutan. Dukungan infrastruktur seperti kandang komunal dan akses air turut memastikan keberlanjutan usaha peternakan. Partisipasi aktif masyarakat, didorong oleh musyawarah desa dan mekanisme umpan balik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas program. Responsivitas dan responsibilitas aparatur desa dalam menangani kendala serta mematuhi regulasi, termasuk PMK 146 Tahun 2023, menjadi kunci keberhasilan. Meski demikian, tantangan berupa kurangnya pengetahuan peternak, akses modal yang terbatas, dan jaringan pasar yang sempit masih menjadi penghambat.

Saran

Untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan hewani di Desa Besuki, diperlukan penguatan pada beberapa aspek strategis. Pemerintah desa sebaiknya terus mengintensifkan pelatihan teknis bagi peternak, tidak hanya berfokus pada manajemen ternak, tetapi juga pada pengolahan hasil ternak agar memiliki nilai tambah di pasar. Selain itu, perluasan jaringan pasar menjadi langkah penting agar hasil ternak lebih mudah dipasarkan dengan harga yang lebih kompetitif. Pemerintah desa juga disarankan menjalin kemitraan lebih luas dengan lembaga keuangan, baik koperasi maupun perbankan, guna memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi peternak. Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, optimalisasi pemanfaatan dana desa harus terus diupayakan, termasuk mencari dukungan dari pemerintah daerah atau

program bantuan lainnya. Pengawasan dan evaluasi rutin juga harus lebih diperketat untuk memastikan program berjalan sesuai target, serta mencegah potensi kegagalan di masa mendatang. Terakhir, memperkuat peran kelompok ternak sebagai wadah kolaborasi dan diskusi antarpeternak akan sangat membantu dalam berbagi pengalaman dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.

REFERENSI

- Akbar, S. (2018). Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. *Jiaganis*, 3(1).
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM press.
- Hidayat, R. A., & Pambudi, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin Melalui Program PKH di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(1), 94–103.
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1–8.
- Mananeke, T., Rares, J., & Tampongangoy, D. (2019). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(78).
- Miles, M. B., Huberman, A. ., & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2018). Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-37. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Saihudin, H. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sedarmayanti, S. G., Pradesa, H. A., Agnesia, T., & Sitorus, T. (2020). The Effect of Good Governance, Leadership and Organizational Culture on Public Performance Accountability. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 9(1).
- Sinaga, O. S., Hasibuan, A., Efendi, E., Priyojadmiko, E., Butarbutar, M., Purba, S., Karwanto, K., Silalahi, M., Hidayatulloh, A. N., & Muliana, M. (2020). *Manajemen kinerja dalam organisasi*. Yayasan Kita Menulis.